

# ANALISIS PENGARUH PDRB PER KAPITA DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP JUMLAH PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Muktar Redy Susila

*muktarredysusila@stiesia.ac.id*

Fastha Aulia Pradhani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

**JIAKu**

Jurnal Ilmiah  
Akuntansi  
dan Keuangan

**Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the effect of GRDP per capita and the labor number on the province tax revenue. Regional tax revenues for each province have different figures. It is suspected that GRDP per capita and number of labor affect local tax revenues. To answer the research hypothesis, multiple linear regression analysis was used. The data used in the study were sourced from the Badan Pusat Statistik in 2020. The dependent variable in this study is local tax revenue, while the independent variables are GRDP per capita and the number of labor. Based on the results of the t-test, it was found that the GRDP per capita and the number of workers had a significant effect on province regional tax revenues. The coefficient value of GRDP per capita and the number of labor is positive. Based on the multiple linear regression model formed, the R<sup>2</sup> value is 91.05%. So it can be said that GRDP per capita and the number of labor can explain the province tax revenue of 91.5%, the remaining 8.5% is explained by other independent variables not included in this study.*

**Key word:**

*tax revenue, GRDP per capita, labor*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh dari PDRB per kapita dan jumlah tenaga kerja terhadap jumlah pendapatan pajak daerah provinsi. Pendapatan pajak daerah setiap provinsi memiliki angka yang berbeda-beda. Diduga bahwa besaran dari PDRB per kapita dan jumlah tenaga kerja mempengaruhi pendapatan pajak daerah. Untuk menjawab hipotesa penelitian ini digunakan metode analisis yaitu regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020. Adapun pada penelitian ini menggunakan variabel dependen pendapatan pajak daerah, sedangkan variabel independennya yaitu PDRB per kapita dan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan hasil uji t didapat bahwa PDRB per kapita dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah provinsi. Untuk nilai koefisien dari PDRB per kapita dan jumlah tenaga kerja yaitu bernilai positif. Berdasarkan model regresi linier berganda yang terbentuk, didapatkan besaran nilai R<sup>2</sup> sebesar 91,05%. Sehingga bisa dikatakan PDRB per kapita dan jumlah tenaga kerja dapat menjelaskan pendapatan pajak daerah provinsi sebesar 91,5%, sisanya yaitu 8,5% dapat dijelaskan variabel independen lainnya yang tidak diikutkan pada penelitian ini.*

**Kata kunci:**

*pendapatan pajak, PDRB per kapita, tenaga kerja.*

## PENDAHULUAN

Setiap satu tahun sekali pemerintah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN. Terdapat dua komponen pada APBN yaitu pendapatan dan pengeluaran (Lestari *et al.*, 2015). Salah satu sumber pendapatan APBN yaitu adalah pajak. Pajak merupakan besaran nominal yang harus dibayarkan oleh perorangan maupun badan kepada negara dengan besaran yang sudah diatur oleh suatu peraturan. Pada umumnya pajak digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut Nurisdayanto (2019), pendapatan negara pada tahun 2019, 82,5 persen merupakan hasil dari pajak. Angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara didominasi oleh hasil pajak. Sedangkan pendapatan non pajak hanya 17,5 persen.

Adapun terdapat beberapa fungsi dari pajak (Putra, 2017). Fungsi pertama dari pajak yaitu fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk menggaji pegawai negeri sipil, tentara, polisi, maupun untuk pembangunan infrastruktur. Fungsi kedua dari pajak yang kedua yaitu fungsi regulasi. Untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara, pajak digunakan sebagai pengaturan kebijakan negara atau

sering yang kita kenal dengan kebijakan fiskal. Fungsi pajak yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Untuk mengendalikan inflasi pemerintah memerlukan sejumlah dana. Dana tersebut bersumber dari pajak yang didapat oleh pemerintah. Adapun fungsi keempat dari pajak yaitu adalah fungsi pemerataan. Indonesia terdiri beberapa provinsi. Setiap provinsi memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Tidak semua provinsi di Indonesia, pendapatannya mampu menutupi pengeluarannya. Sehingga pemerintah pusat dapat menambal kekurangan tersebut. Dilihat dari keempat fungsi pajak tersebut, menunjukkan bahwa pajak sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara.

Pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan jenis pajak berdasarkan sifatnya (Pertiwi *et al.*, 2014). Pajak langsung adalah jenis pajak yang timbul apabila perorangan ataupun kelompok dikenakan pajak melakukan suatu kegiatan atas kejadian tertentu. Sedangkan untuk pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang timbul pada wajib pajak secara berkala. Baik itu pajak perorangan maupun perusahaan.

Pajak negara dan pajak daerah merupakan jenis pajak menurut wilayah pemungutannya (Sunarmin *et al.*, 2015). Pajak negara yaitu pajak yang dikumpulkan atau dihimpun oleh pemerintah pusat. Contoh dari pajak negara yaitu PPN, PPh, dan PPNBM. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikumpulkan atau dihimpun oleh pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak restoran, PBB, BPHTB, pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah lainnya.

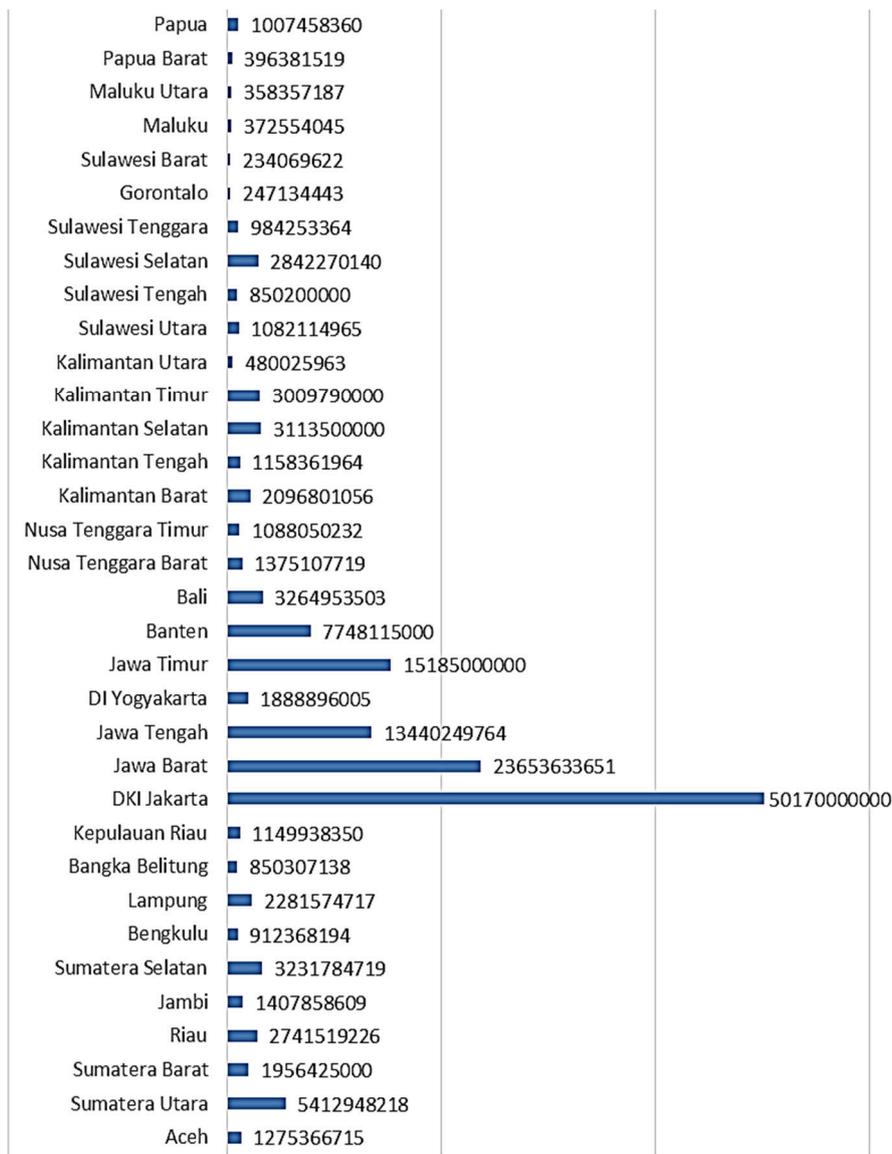
Indonesia terdiri dari 34 provinsi yaitu dimulai dari provinsi paling barat wilayah Indonesia yaitu Provinsi Aceh dan paling timur yaitu Provinsi Papua. Sebagian besar pendapatan provinsi di Indonesia tergantung pada pajak. Setiap provinsi membutuhkan dana untuk menjalankan pemerintahan. Diharapkan pemerintah provinsi mampu menjalankan otonomi daerahnya. Begitu juga dari segi keuangan, diharapkan pendapatan asli daerah dapat menutupi pengeluaran pemerintah. Akan tetapi tidak semua provinsi mampu menjalankannya. Sehingga pemerintah daerah juga mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya semakin kecil nilai transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka kondisi perekonomian daerah tersebut semakin bagus (Kolinug *et al.*, 2015). Begitu juga sebaliknya semakin tinggi nilai transfer dari pemerintah pusat, maka kondisi perekonomian pemerintah daerah tersebut kurang bagus.

Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah berharap pendapatan dari pajak daerah dapat dioptimalkan. Semakin tinggi nilai pendapatan pajak maka akan membuat pendapatan asli daerah semakin tinggi juga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah tersebut semakin bagus. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) setiap provinsi memiliki pendapatan pajak yang berbeda-beda.

Selisih pendapatan pajak provinsi tertinggi dan terendah di Indonesia sangat besar (Gambar 1). Adapun faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi besaran pendapatan pajak daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah tenaga kerja.

PDRB adalah salah satu indikator dari perekonomian suatu daerah (Kairupan, 2013). Menurut pengertiannya PDRB yaitu penjumlahan dari barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produsen pada wilayah maupun waktu tertentu. Adapun beberapa sektor penyusun dari PDRB yang pertama yaitu sektor pertanian, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan pertanian. Sektor kedua yaitu sektor peternakan, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan peternakan. Sektor ketiga yaitu sektor kehutanan dan perikanan, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan kehutanan dan perikanan. Sektor keempat yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan dan penggalian. Sektor kelima yaitu sektor industri pengolahan listrik, gas dan air bersih, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri pengolahan listrik, gas dan air bersih. Sektor keenam yaitu sektor konstruksi, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri konstruksi. Sektor ketujuh yaitu sektor perdagangan, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri perdagangan. Sektor kedelapan yaitu sektor hotel dan restoran, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri hotel dan restoran. Sektor kesembilan yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri pengangkutan dan komunikasi. Sektor kesepuluh yaitu sektor keuangan, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri keuangan. Sektor kesebelas yaitu sektor real estate dan jasa perusahaan, sektor ini merupakan barang

dan jasa yang berkaitan dengan industri real estate dan jasa perusahaan. Sektor yang terakhir yaitu jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.



**Gambar 1**  
**Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Tahun 2020 (dalam ribuan rupiah)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.*

Apabila nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah tersebut maka dikenal dengan istilah PDRB per kapita. PDRB per kapita menunjukkan gambaran atau rata-rata besaran pendapatan dari setiap individu penduduk dalam satu tahun pada suatu wilayah. Besar-kecilnya PDRB per kapita diduga mempengaruhi pendapatan pajak daerah. Menurut Agustina *et al.* (2016), PDRB per kapita berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Hubungan dari PDRB per kapita dengan pendapatan pajak daerah yaitu positif. Pada penelitian tersebut berpendapat bahwa apabila nilai PDRB per kapita mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka akan diikuti kenaikan pendapatan pajak sebesar satu satuan. Begitu juga sebaliknya, apabila PDRB per kapita mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan diikuti penurunan pendapatan pajak daerah sebesar satu satuan.

Tenaga kerja dan angkatan kerja memiliki definisi yang berbeda. Tenaga kerja merupakan penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja yang berkerja dan tidak menganggur (Marini dan Putri, 2019). Menurut BPS, angkatan kerja adalah penduduk yang memiliki usia yang masih produktif,

dimana penduduk tersebut berstatus berkerja maupun tidak bekerja. Adapun menurut pemerintah Indonesia, usia produktif yaitu usia minimal 15 tahun hingga maksimal 65 tahun. Setiap individu melakukan aktifitas kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun contoh dari kebutuhan sehari-hari yaitu makan, sandang, rekreasi, hobbi, dan lain-lain. Apabila seseorang makan disuatu restoran secara tidak langsung menghidupkan perekonomian restoran tersebut. Setiap tahunnya pengusaha restoran membayarkan pajak kepada pemerintah daerah. Tenaga kerja yang memiliki penghasilan lebih akan menyalurkan penghasilan tersebut ke hobbinya, seperti mengoleksi kendaraan bermotor. Setiap tahunnya orang tersebut akan membayarkan pajak kendaraan bermotor tersebut ke pemerintah. Begitu juga seperti sandang dan rekreasi, pengusaha toko maupun pengelola tempat wisata akan membayarkan pajaknya ke pemerintah. Daya beli dan konsumtif individu tersebut akan meningkatkan perekonomian. Sehingga berdampak juga pada pendapatan daerah. Banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja disuatu daerah diduga berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Menurut Mispianiti dan Kristanti (2017) menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja mempengaruhi besaran nilai pendapatan pajak daerah. Hubungan jumlah tenaga kerja dengan pendapatan pajak yaitu positif. Menurut penelitian mereka apabila jumlah tenaga kerja naik satu satuan maka akan diikuti kenaikan pendapatan pajak sebesar satu satuan. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah tenaga kerja mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan diikuti penurunan pendapatan pajak sebesar satu satuan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa pengaruh dari PDRB per kapita dan jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan pajak. Menurut penelitian-penelitian sebelumnya PDRB per kapita, jumlah tenaga kerja, dan jumlah hotel berpengaruh terhadap pendapatan pajak dan memiliki hubungan yang positif.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Pajak Daerah Provinsi**

Pajak merupakan sejumlah iuran wajib yang dibayarkan oleh seseorang dikarenakan peristiwa atau aktifitas tertentu. Besaran nominal pajak sudah ditentukan oleh pemerintah. Adapun beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya pajak yaitu letak tempat, peruntukkan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan (Kamaroellah, 2017). Letak tempat menentukan besar kecilnya nominal pajak. Nominal pajak di tempat dengan kondisi penduduk yang padat akan berbeda dengan tempat dengan kondisi yang tidak padat. Nominal pajak di lingkungan yang padat cenderung lebih tinggi dibandingkan yang tidak padat. Nominal pajak juga menyesuaikan peruntukannya. Apabila diperlukan biaya yang besar untuk peruntukkan tersebut maka nominal pajak akan tinggi juga. Adapun pemanfaatan pajak seperti: sumber dana untuk pengeluaran negara meliputi sumber gaji pegawai pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan digunakan untuk menjalankan aktifitas ekonomi lainnya. Semakin besar nominal tersebut makan akan tinggi juga tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah. Aktifitas industri dapat berdampak pada pencemaran lingkungan, seperti cerobong asap dapat membuat polusi udara, limbah bahan pabrik dapat membuat kerusakan lingkungan, aktifitas industri juga membuat bau yang tidak nyaman, dan masih banyak lainnya dampak negatif dari aktifitas industri. Untuk menangani dampak dari industri tersebut diperlukan sejumlah dana. Oleh sebab itu industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan cenderung dikenakan pajak yang lebih dibandingkan lainnya.

Pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan jenis pajak berdasarkan sifatnya (Pertiwi *et al.*, 2014). Pajak negara dan pajak daerah merupakan jenis pajak berdasarkan wilayah pemungutannya. Pemerintah daerah merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak daerah. Pada tingkat pemerintah provinsi, ada beberapa pajak yang bisa dipungut yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahunnya dan setiap lima tahun sekali kendaraan bermotor wajib cek fisik. Kedua yaitu bea balik nama kendaraan bermotor, setiap melakukan perubahan nama pemiliki motor akan dikenakan besaran pajak dengan nominal tertentu. Ketiga yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak ini dikenakan karena penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor. Keempat yaitu pajak air permukaan dan yang kelima yaitu pajak rokok.

Pajak daerah provinsi digunakan untuk pembangunan dan menjalankan pemerintahan tingkat provinsi. Jenis pajak provinsi berbeda dengan jenis pajak kabupaten/kota. Akan tetapi terdapat provinsi dalam pemungutan pajak tidak membedakan pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Provinsi

tersebut yaitu Provinsi DKI Jakarta. Pendapatan provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya (BPS, 2020).

Pajak kendaraan bermotor memiliki batasan yang paling tinggi yaitu sebesar 10%, untuk bea balik nama kendaraan bermotor yaitu maksimal sebesar 20%, untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor maksimal sebesar 10%, paling tinggi sebesar 10% untuk pajak air permukaan, dan sebesar 10% untuk pajak rokok (Maharani *et al.*, 2014).

Untuk rumus perhitungan besaran pajak yaitu dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak. (1)}$$

Besaran pajak yang harus dibayarkan dapat dicari dengan cara mengalikan besar tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus pada persamaan (1) tersebut berlaku untuk pajak provinsi. Untuk besaran dasar pengenaan pajak berbeda-beda untuk masing-masing jenis pajak.

### **Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Pendapatan Pajak**

PDRB adalah satu indikator yang dijadikan untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu daerah atau wilayah (Murib *et al.*, 2018). Menurut jenisnya PDRB dibagi menjadi dua yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. PDRB harga berlaku yaitu menunjukkan nilai tambah barang maupun jasa pada tahun berjalan, sedangkan PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang maupun jasa terhadap tahun dasar tertentu. Perekonomian daerah dikatakan bagus apabila nilai PDRB-nya tinggi, sedangkan perekonomian daerah dikatakan kurang bagus apabila nilai PDRB-nya rendah. PDRB yang rendah menunjukkan kurang berkembangnya kegiatan perekonomian daerah ataupun wilayah tersebut.

Adapun untuk perhitungan PDRB terdapat tiga pendekatan yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran (Adnan, 2013). Menurut pengertiannya PDRB yaitu penjumlahan dari barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produsen pada wilayah maupun waktu tertentu. Adapun beberapa sektor penyusun dari PDRB yang pertama yaitu sektor pertanian, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan pertanian. Sektor kedua yaitu sektor peternakan, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan peternakan. Sektor ketiga yaitu sektor kehutanan dan perikanan, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan kehutanan dan perikanan. Sektor keempat yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan dan penggalian. Sektor kelima yaitu sektor industri pengolahan listrik, gas dan air bersih, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri pengolahan listrik, gas dan air bersih. Sektor keenam yaitu sektor konstruksi, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri konstruksi. Sektor ketujuh yaitu sektor perdagangan, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri perdagangan. Sektor kedelapan yaitu sektor hotel dan restoran, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri hotel dan restoran. Sektor kesembilan yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri pengangkutan dan komunikasi. Sektor kesepuluh yaitu sektor keuangan, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri keuangan. Sektor kesebelas yaitu sektor real estate dan jasa perusahaan, sektor ini merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri real estate dan jasa perusahaan. Sektor yang terakhir yaitu jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Untuk pendekatan pengeluaran dihitung berdasarkan pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan. Untuk pendekatan pendapatan dihitung dari besar imbal balik dari proses produksi barang dan jasa.

PDRB per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per kapita menunjukkan penduduk tersebut semakin sejahtera. Untuk mengetahui standar hidup suatu daerah atau wilayah dapat digunakan besaran nilai PDRB per kapita (Juliansyah dan Nurbayan, 2018). Tingkat kesejahteraan penduduk dapat mempengaruhi gaya hidupnya. Apabila tingkat kesejahteraan tinggi maka penduduk tersebut cenderung konsumtif. Dampak dari tingkat kesejahteraan tersebut yaitu pada pendapatan pajak. Menurut Agustina *et al.* (2016), PDRB per kapita memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak daerah. PDRB per kapita yang tinggi akan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Oleh sebab itu hipotesa pertama pada penelitian ini yaitu:  $H_1$ : PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap jumlah pendapatan pajak daerah provinsi dan memiliki pengaruh positif.

### Pengaruh tenaga kerja terhadap Pendapatan Pajak

Tenaga kerja merupakan penduduk usia produktif dan masih bekerja (Purnamawati dan Khoirudin, 2019). Salah satu input dalam kegiatan perekonomian yaitu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja menawarkan tenaga maupun keahliannya kepada pengguna. Pada umumnya setiap periode tertentu pekerja akan mendapatkan imbalan atau gaji. Pendapatan tersebut digunakan tenaga kerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Daya konsumtif dari pekerja dapat menghidupkan perekonomian sekitarnya. Semakin banyak tenaga kerja maka akan semakin tinggi perekonomian pada daerah atau wilayah tersebut. Sehingga jumlah tenaga kerja akan berdampak terhadap pendapatan pajak. Menurut Mispriyanti dan Kristanti (2017) menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan dan berarah positif terhadap pendapatan pajak daerah. Berdasarkan penelitian tersebut salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan cara meningkatkan jumlah tenaga kerja. Oleh sebab itu, hipotesa kedua pada penelitian ini yaitu:

H<sub>2</sub>: Jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap jumlah pendapatan pajak daerah provinsi dan memiliki pengaruh positif.

### METODE PENELITIAN

#### Sumber data

Data penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari BPS. Untuk data bisa diakses di [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Data pengamatan menggunakan data tahun 2020.

#### Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel pada penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependen pada penelitian ini yaitu jumlah pendapatan pajak yang dilambangkan  $Y$ . Untuk variabel independen pada penelitian ini yaitu PDRB per kapita dan jumlah tenaga kerja. PDRB per kapita pada penelitian ini dilambangkan  $X_1$  dan jumlah tenaga kerja pada penelitian ini dilambangkan dengan  $X_2$ .

#### Langkah Analisis Penelitian

Ada dua tahapan analisa pada penelitian ini yaitu menganalisa deskriptif data penelitian dan analisa inferensia. Untuk menganalisa deskriptif data penelitian digunakan analisa statistik deskriptif dan untuk analisa inferensia digunakan regresi linier berganda.

Nilai minimal dan maksimal dapat digunakan untuk mencari seberapa besar selisih dari kedua angka tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar ukuran pemusatan bisa digunakan angka rata-rata. Sedangkan untuk mengetahui besar ukuran deviasi bisa digunakan standard deviasi (Walpole *et al.*, 2011).

Pada tahapan model regresi linier berganda terdapat beberapa tahapan langkah pertama yaitu langkah uji asumsi klasik meliputi normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinieritas. Kedua yaitu melakukan uji simultan menggunakan uji F. Ketiga yaitu melakukan uji t dan yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Adapun model matematis dari regresi linier berganda dapat dilihat pada persamaan (2) berikut ini:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1,i} + \beta_2 X_{2,i} + \varepsilon_i. \quad (2)$$

Berikut penjelasan dari simbol-simbol pada persamaan (2):

- $Y$  : Jumlah pendapatan pajak
- $X_1$  : PDRB per kapita
- $X_2$  : Jumlah tenaga kerja
- $\beta_0$  : konstanta
- $\beta_{1,2}$  : koefisien variabel independen
- $\varepsilon$  : residual
- $t$  : observasi ke-i.

Langkah pertama pada analisa regresi linier berganda yaitu melakukan uji asumsi klasik yaitu residual harus berdistribusi normal, bebas dari kasus autokorelasi, bebas dari kasus heteroskedastisitas,

dan bebas dari kasus multikolinieritas. Menurut Susila (2020) untuk uji residual berdistribusi normal bisa menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Residual mengikuti distribusi normal apabila nilai p-value lebih dari 0,05. Untuk uji autokorelasi bisa menggunakan uji Durbin Watson. Adapun kriteria uji Durbin Watson dijelaskan pada Tabel 1 (Susila *et al.*, 2020).

**Tabel 1**  
**Kriteria Uji Durbin Watson**

Kriteria	Hasil
$0 < d < dL$	autokorelasi
$dL \leq d \leq dU$	tidak ada putusan
$dU \leq d \leq 4 - dU$	bebas autokorelasi
$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$	tidak ada putusan
$4 - dL \leq d \leq 4$	autokorelasi

Untuk uji heteroskedasitas bisa menggunakan *scatter plot* dan uji Harvey. Apabila *scatter plot* tidak membentuk suatu pola tertentu maka sudah bisa dikatakan bebas dari kasus heteroskedasitas. Menurut Aryanto dan Handaka (2017), apabila nilai p-value dari uji Harvey lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan sudah bebas dari kasus autokorelasi. Pada model regresi linier berganda tidak diperbolehkan terjadi kasus multikolinieritas. Multikolinieritas terjadi apabila beberapa variabel independen saling berhubungan atau berkorelasi. Model regresi dikatakan terjadi multikolinieritas apabila nilai dari VIF lebih besar dari angka 10 (Supriyadi *et al.*, 2017).

Uji F merupakan langkah kedua pada analisis regresi linier berganda. Kegunaan dari uji F yaitu untuk menguji secara simultan variabel independen terhadap dependen. Menurut Wisudaningsi *et al.* (2019), apabila p-value lebih dari angka 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji t. Untuk langkah ketiga pada analisis regresi linier berganda yaitu melakukan uji t. Variabel dependen dikatakan berpengaruh secara simultan jika nilai p-value lebih besar dari angka 0,05 (Muriyatmoko, 2018).

Untuk menjelaskan besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan koefisien determinasi  $R^2$ . Pada prinsipnya nilai  $R^2$  yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi linier berganda semakin bagus. Nilai  $R^2$  akan tinggi apabila korelasi variabel independen terhadap variabel dependen tinggi.

Adapun setelah dilakukan analisa deskriptif dan inferensia, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pembahasan hasil penelitian. Apabila kesimpulan hasil dari uji t yaitu menyatakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan nilai koefisien regresi dari variabel tersebut bernilai positif, maka hipotesa penelitian dapat diterima.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisa Deskriptif

Pada Tabel 2 disajikan statistik deskriptif yaitu nilai minimal, maksimal, rata-rata, dan standar deviasi dari data penelitian.

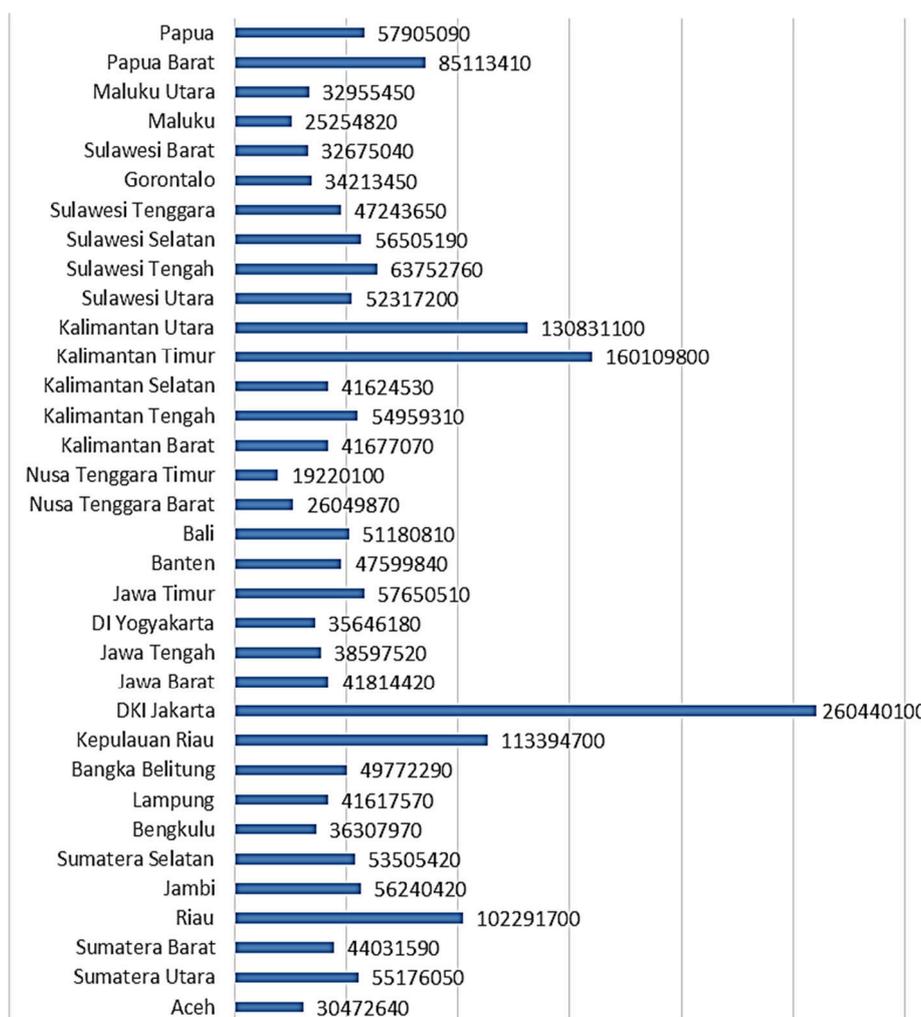
**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif Data Penelitian**

Variabel	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Standard Deviasi
Y	234.069.622.000	50.170.000.000.000	4.625.510.864.352,94	9.435.008.212.579,28
X <sub>1</sub>	19.220.100	260.440.100	61.121.987,35	46.511.326,92
X <sub>2</sub>	330.441	21.674.854	3.778.064,24	5.389.356,16

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Untuk nilai terendah dari pendapatan pajak daerah provinsi yaitu sebesar Rp234.069.622.000, 00. Angka tersebut merupakan pendapatan pajak dari Provinsi Gorontalo. Untuk angka tertinggi dari pendapatan pajak provinsi yaitu Rp50.170.000.000.000,00. Angka tersebut merupakan pendapatan pajak Provinsi DKI Jakarta. Selisih dari angka tertinggi dengan terendah pendapatan pajak provinsi yaitu Rp49.935.930.378.000,00. Angka selisih tersebut sangatlah besar. Dibutuhkan stimulus Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan pendapatan pajak. Pemerintah provinsi harus bisa mendatangkan investor dari dalam maupun luar negeri. Harapannya, dengan adanya modal akan menciptakan lapangan kerja. Sehingga perekonomian Provinsi Gorontalo akan mengalami peningkatan. Peningkatan ekonomi tersebut akan diikuti peningkatan pendapatan pajak. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dalam pemungutan pajak tidak membedakan pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Perkenomian Provinsi DKI Jakarta memang sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dikarenakan Provinsi tersebut merupakan pusat perekonomian negara Indonesia.

Angka rata-rata dari pendapatan pajak daerah provinsi yaitu sebesar Rp4.625.510.864.352,00. Terdapat enam provinsi yang memiliki pendapatan pajak di atas rata-rata. Dapat dilihat pada gambar 1, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten memiliki pendapatan pajak di atas rata-rata. Lima dari keenam provinsi tersebut terletak di Pulau Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia belum merata. Masih terpusat pada Pulau Jawa. Angka standard deviasi menunjukkan angka Rp9.435.008.212.579,00, angka tersebut menunjukkan simpangan data pendapatan pajak provinsi terhadap rata-rata.

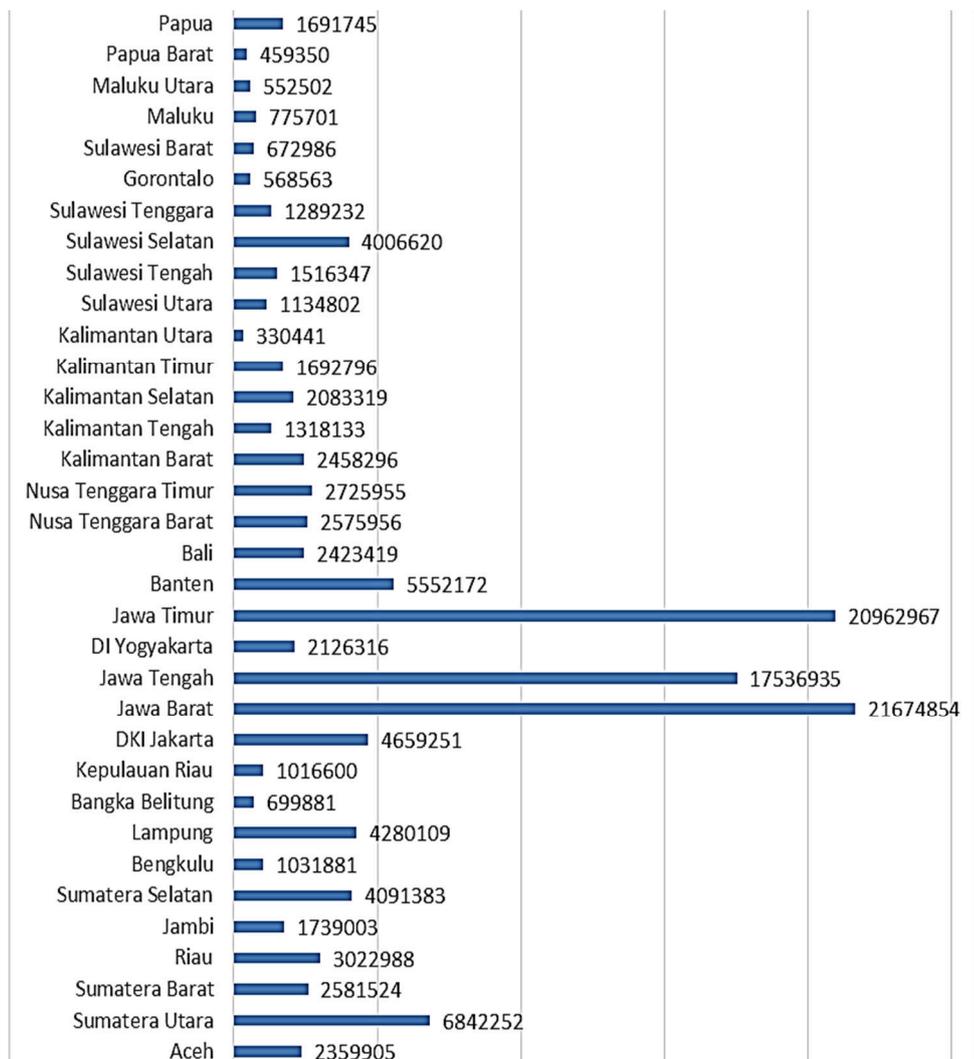


**Gambar 2**  
**PDRB per Kapita Provinsi Tahun 2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Pada gambar 2, angka terendah dari PDRB per kapita pada tahun 2020 yaitu Rp19.220.100,00. Angka tersebut merupakan angka PDRB per kapita dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan angka tertinggi dari PDRB per kapita pada tahun 2020 yaitu Rp260.440.100,00. Angka tersebut merupakan angka PDRB per kapita dari Provinsi DKI Jakarta. Selisih dari angka tertinggi dengan terendah PDRB per kapita provinsi yaitu Rp 241.220.000,00. Angka selisih tersebut sangatlah besar. Ketimpangan pendapatan tersebut menunjukkan tidak meratanya tingkat kesejahteraan penduduk di Indonesia.

Angka rata-rata dari PDRB per kapita provinsi tahun 2020 yaitu sebesar Rp61.121.987,00. Terdapat tujuh provinsi yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata. Dapat dilihat pada Gambar 2, Provinsi Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata. Terdapat 27 provinsi angka PDRB per kapita masih di bawah rata-rata. Banyak faktor yang mempengaruhi angka tersebut seperti jumlah penduduk, angka ketimpangan sosial, investasi yang masuk ke provinsi tersebut, sumber daya alam, dan masih banyak lainnya. Diharapkan provinsi yang memiliki rata-rata PDRB per kapita di bawah rata-rata perlu mendapatkan stimulus agar kesejahteraan penduduknya tercapai. Angka standar deviasi dari PDRB per kapita yaitu sebesar Rp46.511.326,00, angka tersebut menunjukkan simpangan data PDRB per kapita terhadap rata-ratanya.



Gambar 3

**Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Tahun 2020**

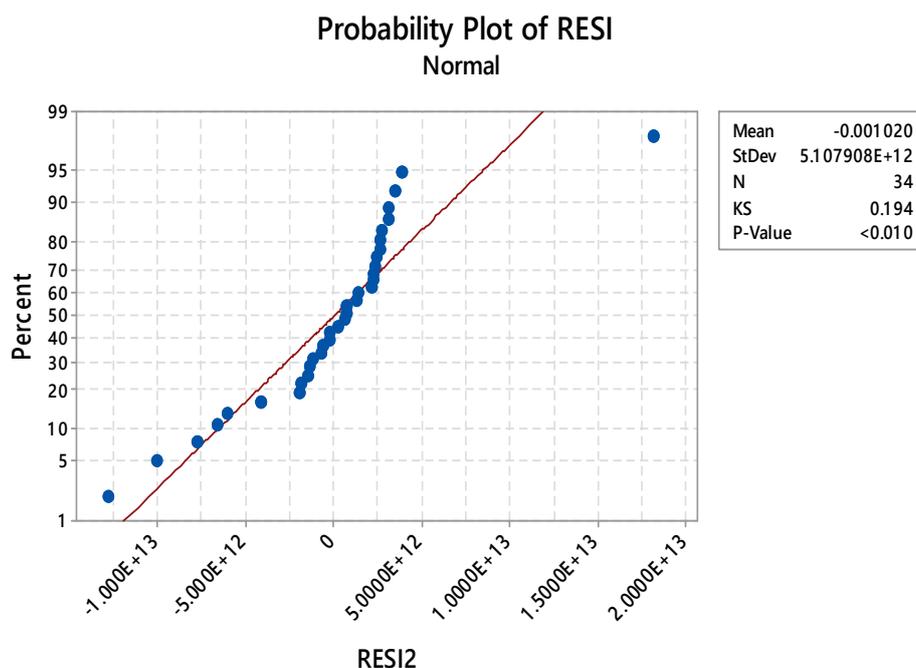
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Pada gambar 3, angka terendah dari jumlah tenaga kerja provinsi pada tahun 2020 yaitu 330.441 orang. Angka tersebut merupakan angka jumlah tenaga kerja dari Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan angka tertinggi dari jumlah tenaga kerja provinsi pada tahun 2020 yaitu 21.674.854 orang. Angka tersebut merupakan angka jumlah tenaga kerja dari Provinsi Jawa Barat. Selisih dari angka tertinggi dengan terendah jumlah tenaga kerja provinsi tahun 2020 yaitu 21.344.413. Angka selisih tersebut sangatlah besar. Selisih angka tersebut menunjukkan kurang meratanya sebaran penduduk di Indonesia.

Rata-rata tenaga kerja provinsi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3.778.064 orang. Terdapat sembilan provinsi yang memiliki angka jumlah tenaga kerja diatas rata-rata. Menurut Gambar 3, provinsi tersebut yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan. Nilai angka standard deviasi menunjukan angka sebesar 5.389.356. Angka tersebut menunjukan simpangan data jumlah tenaga kerja terhadap rata-ratanya.

**Analisa Inferensia**  
**Uji Asumsi Klasik**

Untuk analisis inferensia, data yang digunakan yaitu data yang sudah ditransformasi logaritma. Transformasi dilakukan karena apabila data tanpa transformasi yang digunakan, maka diperoleh hasil bahwa residual tidak memenuhi asumsi berdistribusi normal (Gambar 4).



**Gambar 4**

**Uji Kormogorov Smirnov Residual dari Data Penelitian**

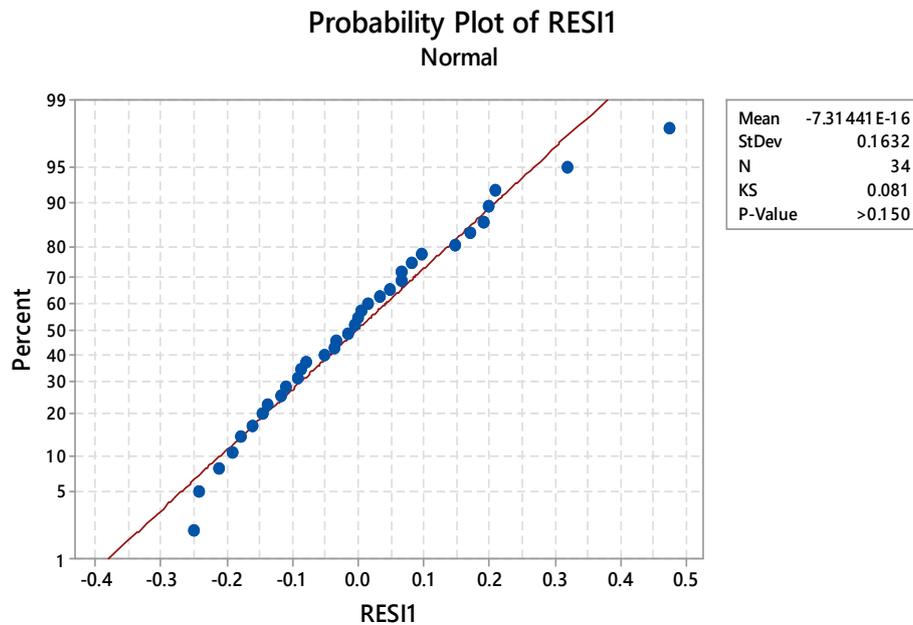
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 diolah dengan Minitab 17.

Gambar 5 merupakan hasil uji Kolmogorov Smirnov dari data penelitian yang sudah ditransformasi logaritma. Berdasarkan Gambar 5, diperoleh nilai uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,081 dan angka nilai p-value sebesar lebih dari 0,15. Hasil dari angka nilai p-value yang diperoleh menunjukan lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual sudah memenuhi asumsi berdistribusi normal.

Hasil uji Durbin Watson menunjukan angka sebesar 2,25. Untuk nilai tabel Durbin Watson dengan 34 pengamatan dan 2 variabel independen diperoleh nilai dL sebesar 1,33 dan nilai dU sebesar 1,58. Hasil uji Durbin Watson menunjukan kondisi  $1,58 < 2,25 < 2,42$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi linier berganda yang terbentuk sudah memenuhi asumsi bebas dari kasus autokorelasi.

Untuk uji heteroskedasitas digunakan dua metode pengujian, yaitu menggunakan *scatter plot* dan uji Harvey. Berdasarkan Gambar 6, dapat dikatakan bahwa tidak ada pola tertentu (pola corong, pola

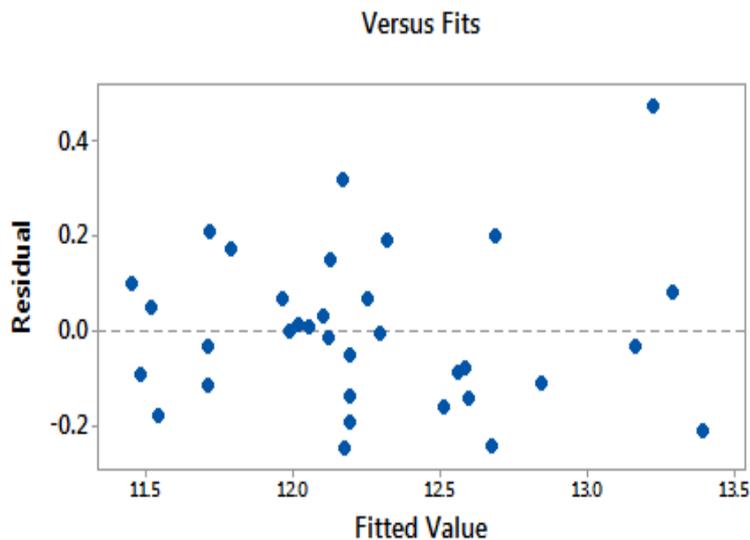
cenderung naik, pola cenderung turun, maupun pola gelombang) yang terbentuk dari titik-titik residual vs fitted value. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi linier berganda yang terbentuk sudah bebas dari kasus heteroskedasitas. Untuk memperkuat hasil tersebut, maka dilakukan uji Harvey. Adapun hasil uji Harvey diperoleh nilai p-value sebesar 0,18. Nilai p-value yang diperoleh lebih dari angka 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda yang terbentuk sudah bebas dari kasus heteroskedasitas.



**Gambar 5**

**Uji Kormogorov Smirnov Residual dari Data Penelitian Ditransformasin Logaritma**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 diolah dengan Minitab 17.*



**Gambar 6**

**Uji Heteroskedasitas Data Penelitian Ditransformasi Logaritma**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 diolah dengan Minitab 17.*

Nilai VIF dari data ditransformasi logaritma diperoleh untuk PDRB per kapita sebesar 1 dan untuk jumlah angkatan kerja sebesar 1. Angka VIF yang diperoleh dari kedua variabel independen tersebut kurang dari angka 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda yang terbentuk sudah bebas dari kasus multikolinieritas.

Semua asumsi klasik yang dipersyaratkan pada analisis regresi linier berganda sudah terpenuhi. Sehingga dapat dilanjutkan untuk analisa selanjutnya. Adapun analisis selanjutnya yaitu melakukan uji simultan dengan uji F, uji parsial menggunakan uji t, dan menjelaskan nilai koefisien determinasi.

**Model Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan data penelitian yang sudah ditransformasi logaritma, diperoleh nilai koefisien pada Tabel 3. Berikut adalah model regresi linier berganda yang terbentuk:

$$\log(Y_i) = -1,15 + 0,84\log(X_{1,i}) + 1,10\log(X_{2,i}) + \epsilon_i.$$

**Tabel 3**  
**Koefisien Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien
Konstanta	-1,15
log X <sub>1</sub>	0,84
log X <sub>2</sub>	1,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 diolah dengan Minitab 17.

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, diperoleh bahwa nilai koefisien dari PDRB per kapita yaitu sebesar 0,84. Apabila ditransformasi balik antilogaritma (0,84) maka diperoleh nilai 6,92. Besar koefisien variabel PDRB per kapita yaitu bernilai positif. Apabila PDRB per kapita naik satu satuan maka nilai dari pendapatan pajak akan naik sebesar 6,92 satu satuan dengan asumsi nilai jumlah tenaga kerja tidak mengalami perubahan. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB per kapita turun satu satuan maka nilai dari pendapatan pajak akan turun sebesar 6,92 satu satuan dengan asumsi nilai jumlah tenaga kerja tidak mengalami perubahan.

Nilai koefisien dari jumlah tenaga kerja yaitu sebesar 1,10. Apabila ditransformasi balik antilogaritma (1,10) maka diperoleh nilai 12,59. Besar koefisien variabel jumlah tenaga kerja yaitu bernilai positif. Jika jumlah tenaga kerja naik satu satuan maka nilai dari pendapatan pajak akan naik sebesar 12,59 satu satuan dengan asumsi nilai PDRB per kapita tidak mengalami perubahan. Begitu juga sebaliknya apabila jumlah tenaga kerja turun satu satuan maka nilai dari pendapatan pajak akan turun sebesar 12,59 satu satuan dengan asumsi nilai PDRB per kapita tidak mengalami perubahan.

**Uji F**

Adapun hasil uji F ditampilkan pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai F sebesar 157,68 dan nilai p-value sebesar 0,00.

**Tabel 4**  
**Uji F**

Sumber	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regresi	2	8,94	4,47	157,68	0,00
log X <sub>1</sub>	1	1,27	1,27	44,70	0,00
log X <sub>2</sub>	1	7,89	7,89	278,27	0,00
Error	31	0,88	0,03	-	-
Total	33	9,82	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 diolah dengan Minitab 17.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita dan jumlah angkatan kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan pajak daerah provinsi.

**Uji t**

Tabel 5 merupakan hasil uji t. Berdasarkan Tabel 5 untuk PDRB per kapita diperoleh nilai t sebesar 6,69 dan nilai p-value sebesar 0,00. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh secara

signifikan terhadap pendapatan pajak daerah provinsi. Untuk jumlah tenaga kerja diperoleh nilai  $t$  sebesar 16,68 dan nilai  $p$ -value sebesar 0,00. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah provinsi.

**Tabel 5**  
**Uji t**

Variabel	Koefisien	SE Koefisien	T-Value	P-Value	VIF
Konstanta	-1,15	1,07	-1,07	0,29	-
log_X <sub>1</sub>	0,84	0,13	6,69	0,00	1,00
log_X <sub>2</sub>	1,10	0,07	16,68	0,00	1,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 diolah dengan Minitab 17.

### Koefisien Determinasi

Berdasarkan model regresi linier berganda yang terbentuk, diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 91,05%. Sehingga dapat dikatakan PDRB per kapita dan jumlah angkatan kerja dapat menjelaskan pendapatan pajak daerah provinsi sebesar 91,5%, variabel independen lainnya yang tidak ada pada model dapat menjelaskan sisanya yaitu 8,5%.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil uji  $t$  untuk variabel PDRB per kapita diperoleh nilai  $p$ -value sebesar 0,00 dan nilai koefisien sebesar 6,92. Hasil analisa inferensia diperoleh bahwa PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah provinsi.

Arah pengaruh dari PDRB per kapita terhadap pendapatan pajak yaitu bernilai positif. Apabila PDRB per kapita naik satu satuan maka nilai dari pendapatan pajak akan naik sebesar 6,92 satu satuan dengan asumsi nilai jumlah tenaga kerja tidak mengalami perubahan. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB per kapita turun satu satuan maka nilai dari pendapatan pajak akan turun sebesar 6,92 satu satuan dengan asumsi nilai jumlah tenaga kerja tidak mengalami perubahan. Hasil yang diperoleh penelitian menunjukkan bahwa hipotesa pertama pada penelitian ini yaitu:

H<sub>1</sub>: PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap jumlah pendapatan pajak daerah provinsi dan memiliki pengaruh positif, dapat diterima.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Agustina *et al.* (2016), yang berpendapat bahwa PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak daerah. PDRB per kapita yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan penelitian ini dan penelitian sebelumnya, pemerintah provinsi harus memperhatikan perekonomian daerah yang dipimpin. Karena perekonomian yang bagus akan berdampak terhadap PDRB per kapita.

PDRB per kapita yang tinggi akan meningkatkan pendapatan pajak daerah provinsi. Pemerintah provinsi harus mampu mendatangkan investor supaya banyak tercipta lapangan kerja dan akan mengurangi angka pengangguran. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, investasi yang masuk harus dikelola dan didukung dengan peraturan yang bisa menguntungkan para investor maupun pekerja. Keseimbangan yang terbentuk harus didukung dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Besaran upah harus tidak memberatkan pengusaha dan pekerja. Apabila upah terlalu tinggi para investor akan enggan berbisnis didaerah tersebut. Potensi kerugian akan tinggi dikarenakan beban biaya produksi yang tinggi. Apabila keseimbangan terbentuk, maka perekonomian wilayah tersebut akan tumbuh dan berdampak terhadap kenaikan PDRB per kapita. PDRB per kapita suatu wilayah yang tinggi akan diikuti kemampuan dan besaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Angka PDRB per kapita yang tinggi akan diikuti pendapatan pajak yang tinggi.

Berdasarkan hasil uji  $t$  untuk variabel tenaga kerja diperoleh nilai  $p$ -value sebesar 0,00 dan nilai koefisien sebesar 12,59. Hasil analisa inferensia menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah provinsi. Pengaruh dari tenaga kerja terhadap pendapatan pajak yaitu bernilai positif. Apabila jumlah tenaga kerja naik satu satuan maka nilai dari pendapatan pajak akan naik sebesar 12,59 satu satuan dengan asumsi nilai PDRB per kapita tidak mengalami perubahan. Begitu juga

sebaliknya apabila jumlah tenaga kerja turun satu satuan maka nilai dari pendapatan pajak akan turun sebesar 12,59 satu satuan dengan asumsi nilai PDRB per kapita tidak mengalami perubahan. Hasil yang diperoleh penelitian menunjukkan bahwa hipotesa kedua pada penelitian ini yaitu:

H<sub>2</sub>: Jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap jumlah pendapatan pajak daerah provinsi dan memiliki pengaruh positif, dapat diterima.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Mispityanti dan Kristanti (2017), yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

Hubungan jumlah tenaga kerja dengan penerimaan pajak yaitu positif. Menurut penelitian mereka apabila jumlah tenaga kerja naik satu satuan maka akan diikuti kenaikan penerimaan pajak sebesar satu satuan. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah tenaga kerja turun satu satuan maka akan diikuti penurunan penerimaan pajak sebesar satu satuan. Berdasarkan penelitian ini dan penelitian sebelumnya, pemerintah provinsi harus memperhatikan ketersediaan lapangan kerja untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja. Peraturan daerah dibuat sedemikian rupa supaya tidak menyulitkan para pengusaha untuk membuka usahanya.

Dukungan pemerintah kepada para pengusaha sangat penting. Terkait penetapan harga minimum barang bahan produksi maupun upah minimum dari tenaga kerja. Apabila kebijakan yang dibuat pemerintah tidak mendukung para pengusaha, maka pengusaha akan mengalami kemunduruan dan paling parah yaitu berdampak terhadap kebangkrutan usaha. Apabila lapangan kerja berkurang maka berdampak terhadap penurunan jumlah tenaga kerja. Penurunan jumlah tenaga kerja akan menurunkan pendapatan pajak daerah.

Peranan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja harus diperhatikan. Diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari para perkerja. Apabila jumlah tenaga kerja yang banyak tidak diikuti dengan kualitasnya, maka akan berdampak terhadap produktifitas pekerja tersebut. Pada prinsipnya seorang investor akan memilih wilayah dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan berkualitas. Persediaan tenaga kerja yang melimpah membuat upah yang ditawarkan oleh pengusaha akan rendah. Apabila tenaga kerja yang ditawarkan sedikit, maka akan diikuti permintaan upah yang tinggi dari para pekerja. Para pengusaha akan enggan mengeluarkan upah yang tinggi, dikarenakan akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh. Saat ini tenaga kerja yang terlatih dan terampil banyak dijumpai di Provinsi DKI Jakarta. Di provinsi tersebut banyak perusahaan nasional, multinasional, maupun BUMN. Upah yang diperoleh para pekerja cenderung lebih tinggi dibandingkan upah yang diterima provinsi lainnya. Upah yang diterima oleh para pekerja akan berdampak kepada angka PDRB per kapita provinsi. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita provinsi, akan menaikkan pendapatan pajak daerah. Secara tidak langsung kemampuan daya beli masyarakat akan terangkat. Daya beli tersebut akan menghidupkan aktivitas ekonomi pada wilayah tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pada hasil analisa dan pembahasan diperoleh hasil analisa deskriptif dan inferensia yang sudah memenuhi asumsi yang disyaratkan. Berdasarkan hasil analisa didapatkan kesimpulan bahwa PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap pendapatan pajak daerah provinsi. Hasil serupa berlaku juga untuk jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap pendapatan pajak daerah provinsi. Sehingga kenaikan PDRB per kapita maupun jumlah tenaga kerja dapat menaikkan pendapatan pajak daerah provinsi.

Adapun saran bagi pemerintah berdasarkan hasil analisa dan penelitian ini yaitu pemerintah pusat harus memperhatikan pemerataan pembangunan perekonomian. Penerimaan pajak yang tinggi masih didominasi provinsi yang berada di Pulau Jawa. Adapun saran selanjutnya untuk pemerintah yaitu agar mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk. Karena dengan adanya lapangan kerja tersebut dapat menambah PDRB per kapita dan jumlah angkatan kerja.

Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu untuk analisa inferensia menggunakan data transformasi logaritma. Hal tersebut dilakukan karena apabila menggunakan data tanpa ditransformasi akan diperoleh analisa regresi linier berganda yang tidak memenuhi asumsi yang disyaratkan. Pada hasil analisa ditunjukkan dengan menggunakan data tanpa ditransformasi diperoleh hasil uji kolmogorov-Smirnov dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Setelah digunakan data yang sudah ditransformasi diperoleh nilai p-value lebih besar dari 0,05.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, N. 2013. Analisis Penghitungan Inflasi Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan Periode 2001 – 2011. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11(2): 141-149.
- Agustina, S., Susetyo, D., dan Yunisvita. 2016. Pengaruh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(1): 22-30.
- Aryanto, W. dan Handaka, R. D. 2017. Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajerial* 2(2): 52-63.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Juliansyah, H dan Nurbayan. 2018. Pengaruh Pendapatan Perkapita, PDRB, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2016. *Jurnal ekonomika* 7(2): 45-51.
- Kairupan, S. P. 2013. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012. *Jurnal EMBA* 1(4): 2206-2216.
- Kamaroellah, R. A. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(1): 82-103.
- Kolinug, F. C., Kumenaung, A. G., dan Rotinshu, D. C. 2015. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 17(2): 1-20.
- Lestari, N. N. S. A, Bagia, I. W., dan Jana, G. P. A. S. 2015. Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha* 3(1): 1-11.
- Maharani, N. R., Husaini, A., dan Sunarti. 2014. Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008-2013). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 2(1): 1-9.
- Marini, I., dan Putri, N. T. 2019. Peluang Terjadinya Pengangguran di Provinsi Bengkulu: Seberapa Besar?. *Convergence: The Journal Of Economic Development* 1(1): 70-83.
- Mispiyati dan Kristanti, I. N. Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*: 219-233.
- Murib, D., Koleangan, R. A. M., dan Tolosang, K. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, PPRD Terhadap PAD di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(1): 23-33.
- Muriyatmoko. 2018. Analisa Volume Terhadap Sitasi Menggunakan Regresi Linier pada Jurnal Bereputasi di Indonesia. *Jurnal Simatec* 6(3): 129-134.
- Nurisdianto, W. A. 2019. Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Publikasi Dirjen Jendral Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>.
- Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., dan Kurniawan, B. C. 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan* 3(1): 1-7.
- Purnamawati, D. L. dan Khoirrudin, R. 2019. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Manufaktur di Jawa Tengah 2011-2015. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4(1): 41-52.
- Putra, A. F. 2017. Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6(1): 1-12.
- Sunarmin, Triyulianto, T., dan Susanti, I. 2015. Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Restoran Oleh Restoran Lapo Ni Tondongta pada Tahun 2014. *Jurnal Reformasi Administrasi* 2(3): 122-130.

- Supriyadi, E., Mariana, S., dan Sugiman. 2017. Perbandingan Metode Partial Least Square (PLS) dan Principal Component Regression (PCR) untuk Mengatasi Multikolinearitas pada Model Regresi Linear Berganda. *UNNES Journal of Mathematics* 6(2): 117-128.
- Susila, M. R. 2020. Pengaruh Hari Raya Idul Fitri Terhadap Inflasi di Indonesia dengan Pendekatan ARIMAX (Variasi Kalender). *Jurnal Berekeng*. 14(3): 367-376.
- Susila, M. R., Putri, R. C., dan Arini, D. 2020. Pemodelan Regresi Spasial Investasi Luar Negeri yang Masuk ke Indonesia. *Jurnal Berekeng*. 14(4): 543-556.
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., dan Ye, K. 2011. *Probability & Statistics for engineers & scientist, Ninth Edition*. Boston: Pearson Education.
- Wisduaningsi, B. A., Arofah, I., dan Belang, K. A. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen dengan Menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda. *STATMAT (Jurnal Statistika dan Matematika)* 1(1): 103-116.